



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.649008/2021**



DS:1168-3901-2004-0570

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI   |
| 2. Unit Organisasi            | : (10)     | Badan Pembinaan Hukum Nasional   |
| 3. Provinsi                   | : (30)     | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  |
| 4. Kode/Nama Satker           | : (649008) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG                                |
| Sebesar                       | : Rp.      | 920.279.000 ( SEMBILAN RATUS DUA PULUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	920.279.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 920.279.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.



Jakarta, 23 November 2020  
A. N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



DS:1168-3901-2004-0570

**NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.649008/2021**

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI   |
| 2. Unit Organisasi            | : (10)     | Badan Pembinaan Hukum Nasional   |
| 3. Provinsi                   | : (30)     | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (649008) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG                                |
| Sebesar                       | : Rp.      | 920.279.000 ( SEMBILAN RATUS DUA PULUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- |       |                         |
|-------|-------------------------|
| 03    | KETERTIBAN DAN KEAMANAN |
| 03.03 | PEMBINAAN HUKUM         |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	920.279.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN PANGKAL PINANG | (015) Rp. | 920.279.000 |
|------------------------|-----------|-------------|

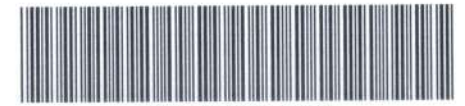
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A. N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.2.649008/2021**



DS:1168-3901-2004-0570

Satker : (649008) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	99.513.000
BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	99.513.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	820.766.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	820.766.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649008/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



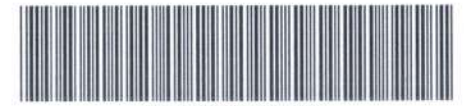
DS:1168-3901-2004-0570

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (649008) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			99.513.000	
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			99.513.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	99.513.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	99.513.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			820.766.000	
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			820.766.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum				
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah				
		5. 05	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4,00	Lembaga	102.807.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi JDIHN	4,00	Lembaga	102.807.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12,00	Kelompok Masyarakat	145.000.000
Rincian Output	:	01	BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	101.880.000
		02	BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	43.120.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649008/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1168-3901-2004-0570

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (649008) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6,00	Lembaga	33.233.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum		6,00	Lembaga	33.233.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		6,00	Lembaga	43.706.000
Rincian Output		:	01 PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	(PN)	6,00	Lembaga	43.706.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		54,00	Orang	432.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	54,00	Orang	432.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		6,00	Kelompok Masyarakat	64.020.000
Rincian Output		:	01 QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	6,00	Kelompok Masyarakat	64.020.000

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

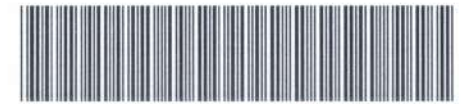
ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.2.649008/2021

I B. SUMBER DANA



DS:1168-3901-2004-0570

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649008) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	920.279.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	920.279.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBPN	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

Pagu

Ekuivalen Rupiah

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

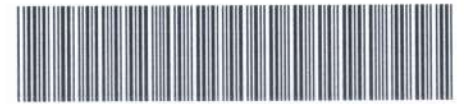
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.2.649008/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS.1168-3901-2004-0570

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649008) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG  
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649008	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	-	915.279	5.000	-	-	920.279		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	99.513	-	-	-	99.513		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	99.513	-	-	-	99.513		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	99.513	-	-	-	99.513	30.51	
01	RM	-	99.513	-	-	-	99.513	015	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	815.766	5.000	-	-	820.766		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	815.766	5.000	-	-	820.766		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	97.807	5.000	-	-	102.807	30.51	
01	RM	-	97.807	5.000	-	-	102.807	015	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	145.000	-	-	-	145.000	30.51	
01	RM	-	145.000	-	-	-	145.000	015	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.2.649008/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS.1168-3901-2004-0570

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649008) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG  
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II, 2  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	33.233	-	-	-	33.233	30.51	
01 RM		-	33.233	-	-	-	33.233	015	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	43.706	-	-	-	43.706	30.51	
01 RM		-	43.706	-	-	-	43.706	015	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	432.000	-	-	-	432.000	30.51	
01 RM		-	432.000	-	-	-	432.000	015	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	64.020	-	-	-	64.020	30.51	
01 RM		-	64.020	-	-	-	64.020	015	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>915.279</b>	<b>5.000</b>	-	-	<b>920.279</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
 Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
 NIP 196204101987031003



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649008/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS.1168-3901-2004-0570

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (649008) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	649008	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	25.864	46.412	67.946	116.204	118.162	69.493	99.560	99.561	67.756	79.294	70.789	59.238	920.279
		<b>BELANJA BARANG</b>	25.864	46.412	65.446	113.704	118.162	69.493	99.560	99.561	67.756	79.294	70.789	59.238	915.279
		<b>BELANJA MODAL</b>	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	3.364	3.364	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.274	99.513
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	3.364	3.364	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.274	99.513
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	22.500	43.048	58.667	106.925	108.883	60.214	90.281	90.282	58.477	70.015	61.510	49.964	820.766
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	22.500	43.048	56.167	104.425	108.883	60.214	90.281	90.282	58.477	70.015	61.510	49.964	815.766
		53 BELANJA MODAL	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649008/2021  
IV A. B L O K I R**



DS.1168-3901-2004-0570

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [30] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode dan Nama Satker : [649008] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649008/2021  
IV B. C A T A N**



DS.1168-3901-2004-0570

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [30] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode dan Nama Satker : [649008] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003